

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Konflik Agraria Kepemilikan Properti oleh Asing dalam Unggahan Media Lokal di Bali” ini ditulis oleh Syanika Putri Sukmaningtyas, Nim.126304212099, dengan pembimbing Dimas Prakoso Nugroho S.Kom.,MA.

**Kata Kunci:** Konflik Agraria, Kepemilikan Asing, Media Daring, Bali

Penelitian ini mengelaborasi representasi konflik agraria akibat kepemilikan properti oleh warga negara asing dalam pemberitaan media daring di Bali serta kecenderungan narasi yang muncul selama periode Januari 2024 hingga Mei 2025. Meningkatnya kedatangan WNA ke Bali disertai praktik kepemilikan properti melalui skema ilegal seperti nominee agreement dan sewa jangka panjang telah memicu disrupsi terhadap sistem agraria, nilai adat, serta tatanan sosial masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode analisis isi terhadap 34, yang diperkuat dengan data kualitatif berupa wawancara diperoleh hasil bahwa 82% berita membingkai konflik sebagai isu hukum dan sosial, dengan fokus pada kepemilikan ilegal dan pelanggaran terhadap norma adat. Subjek konflik paling dominan adalah WNA dan pemerintah, sedangkan jenis properti yang paling banyak diberitakan adalah vila dan tempat usaha. Sebanyak 61% konflik muncul akibat alih fungsi lahan dan penguasaan ilegal, namun 53% dari kasus tersebut tidak disertai tindakan hukum, mencerminkan lemahnya penegakan regulasi. Data wawancara mendalam dari informan lokal menegaskan bahwa masyarakat mengalami tekanan ekonomi dan kehilangan kontrol atas ruang hidup, serta merasa kurang terlindungi oleh hukum negara. Penelitian ini menegaskan bahwa media daring bukan hanya alat penyampai informasi, tetapi juga aktor penting dalam membentuk opini publik mengenai konflik agraria. Narasi yang dibangun media lebih sering memperkuat persepsi bias ketimbang mendorong advokasi. Temuan ini menekankan pentingnya reformulasi regulasi agraria, perlindungan atas hak ulayat, dan peningkatan literasi media sebagai respons terhadap penetrasi modal asing yang tidak terkendali.

## ***ABSTRACT***

The thesis titled “Agrarian Conflict over Foreign Property Ownership in Local Media Posts in Bali” was written by Syanika Putri Sukmaningtyas, Student ID 126304212099, under the supervision of Dimas Prakoso Nugroho, S.Kom., M.A.

**Keywords:** Agrarian Conflict, Foreign Ownership, Online Media, Bali

This study explores the representation of agrarian conflict resulting from foreign property ownership in online media coverage in Bali, as well as the narrative tendencies that emerged between January 2024 and May 2025. The increasing influx of foreign nationals (FNs) to Bali, accompanied by property ownership practices through illegal schemes such as nominee agreements and long-term leases, has disrupted local agrarian systems, customary values, and social structures. Using a quantitative content analysis of 34 news articles, supported by qualitative in-depth interviews, the study found that 82% of the media reports framed the conflict as legal and social issues, focusing on illegal ownership and violations of local customs. The dominant conflict actors identified were FNs and the government, while the most frequently reported property types were villas and business establishments. Approximately 61% of the conflicts stemmed from land-use conversion and illegal acquisition, with 53% of the cases lacking any legal action—indicating weak regulatory enforcement. In-depth interviews with local informants reinforced the findings, revealing that communities are experiencing economic pressure, loss of control over their living space, and inadequate legal protection from the state. This study affirms that online media are not merely information conveyors but also active agents in shaping public opinion on agrarian conflicts. However, the narratives presented tend to amplify biased perceptions rather than promote structural advocacy. These findings highlight the urgent need for agrarian regulatory reform, protection of customary land rights, and strengthened media literacy to counteract the unchecked expansion of foreign capital.